



Kredit Lancar, UMKM dan Petani Sejahtera: Saatnya Memperkuat Pengawasan Kredit Tabalong SMART

Penulis :

Abdasiratul Hidayah, Analis Kebijakan Ahli Muda, Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

Isnawati, Analis Kebijakan Ahli Muda, Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Kredit Tabalong SMART merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun memberikan manfaat yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek pengawasan dan monitoring penyaluran kredit.

Berdasarkan data dari PT. BPR Tabalong Bersinar (Perseroda) sampai dengan akhir Juni 2026 telah merealisasikan pinjaman sebesar Rp.6.619.500.000,- kepada 1.014 nasabah yang terdiri dari 781 pelaku UMKM dan 233 petani. Dari data tersebut disebutkan bahwa kualitas Kredit Tabalong Smart dengan kategori lancar sebesar 98,8%, kategori kurang lancar sebesar 0,17% dan kategori macet sebesar 0,56% dengan tingkat NPL sebesar 0,84%. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah lemahnya sistem pengawasan pascapenyaluran kredit. Monitoring terhadap penggunaan dana, perkembangan usaha penerima manfaat, dan kemampuan pengembalian pinjaman belum dilakukan secara optimal. Akibatnya, terdapat potensi penyalahgunaan dana, keterlambatan pembayaran angsuran, hingga meningkatnya risiko kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL).

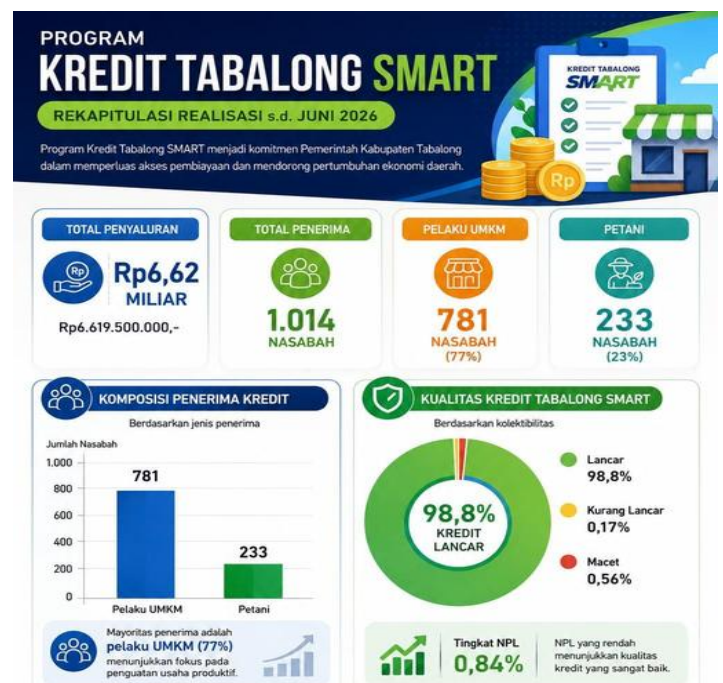
Empat Alternatif Kebijakan yang dapat diterapkan adalah: (1) Pengawasan Preventif, (2) Pengawasan Administrasi, (3) On-Site Monitoring, dan (4) Pengawasan Berbasis Risiko. Berdasarkan metode Grid Analysis (Analisis Matriks) pengawasan yang dapat dilakukan adalah penguatan pengawasan berbasis risiko. Dengan penerapan kebijakan terintegrasi diharapkan program Kredit Tabalong Smart terus berkembang dan berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

PENDAHULUAN

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah karena berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Lebih lanjut untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengembangkan Kredit Tabalong SMART sebagai upaya meningkatkan akses pembiayaan yang mudah, murah, dan inklusif (Muhammad Ariadi, TV Tabalong, 2026)



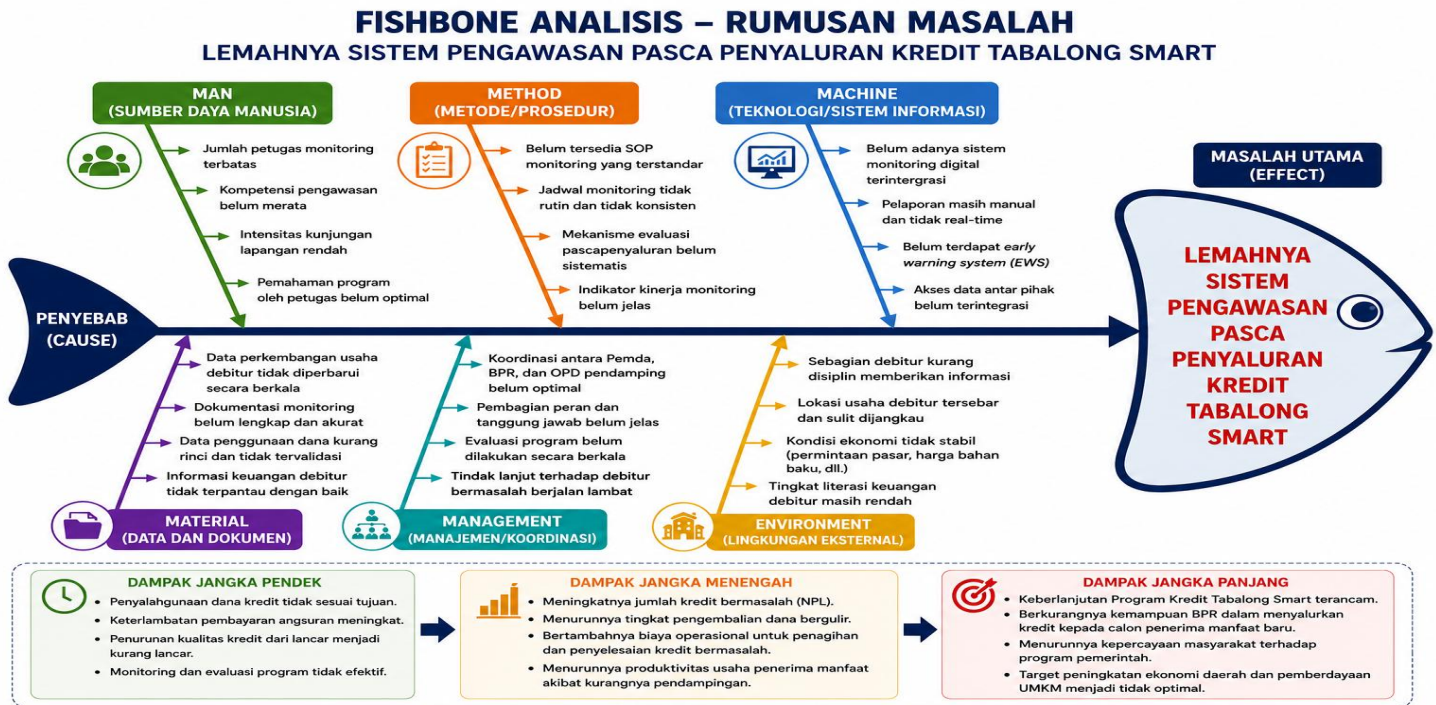
Ditujukan Kepada Yth :
Bupati Tabalong



DESKRIPSI MASALAH

Dalam rangka mewujudkan Kredit Tabalong Smart yang lancar dan berkelanjutan, maka diperlukan pengawasan yang efektif dan terintegrasi, untuk menghindari permasalahan yang sering terjadi yaitu lemahnya sistem pengawasan pascapenyyaluran kredit. Monitoring terhadap penggunaan dana, perkembangan usaha penerima manfaat, dan kemampuan pengembalian pinjaman belum dilakukan secara optimal. Akibatnya, terdapat potensi penyalahgunaan dana, keterlambatan pembayaran angsuran, hingga meningkatnya risiko kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL)

Berikut adalah rancangan rumusan masalah berdasarkan metode fishbone :



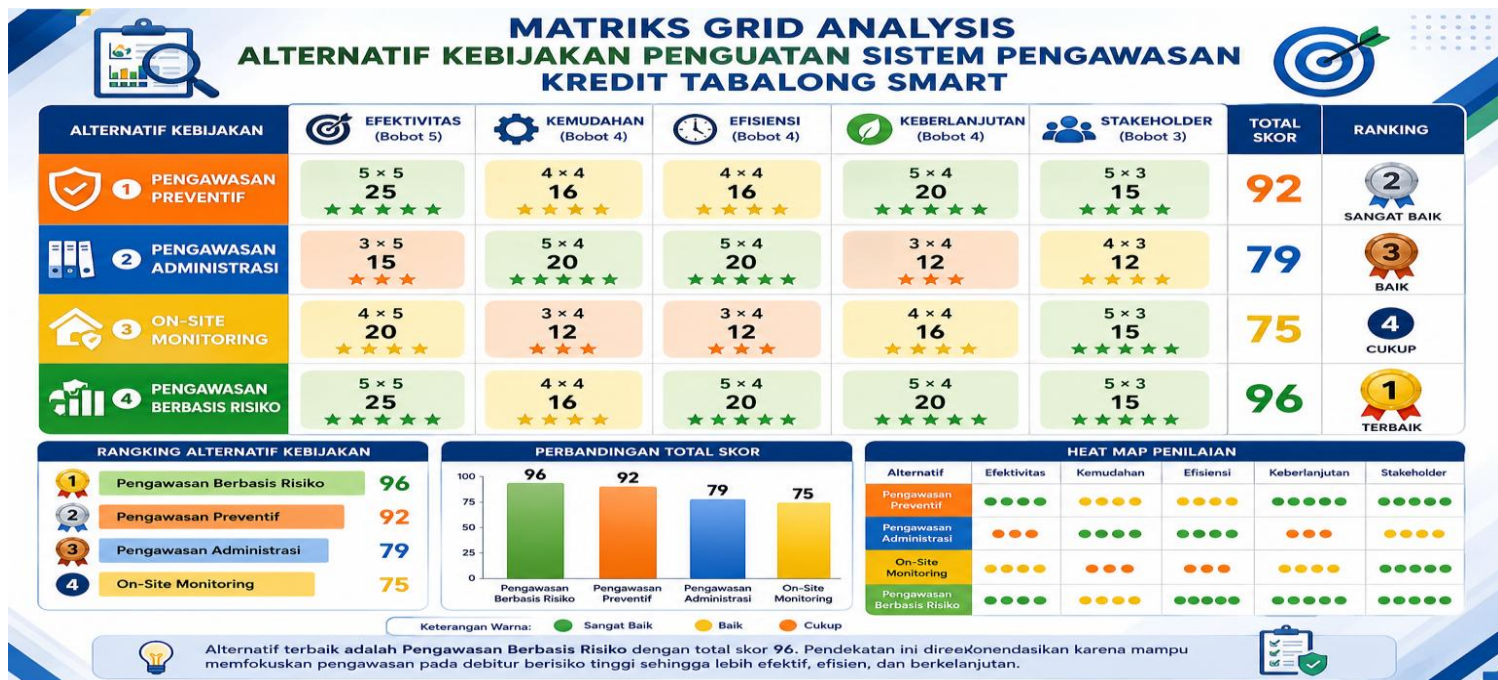
Faktor penyebab :

1. SDM : Faktor manusia berkaitan dengan kualitas petugas maupun karakteristik debitur, Kelemahan pada aspek SDM menyebabkan calon debitur yang kurang layak tetap memperoleh pembiayaan dan penggunaan dana menjadi sulit dikendalikan
2. Metode : Aspek metode menunjukkan kelemahan dalam prosedur pengawasan, Kelemahan metode membuat penyimpangan penggunaan dana maupun potensi gagal bayar tidak terdeteksi sejak dini.
3. Sistem : Pengambil keputusan terlambat memperoleh informasi sehingga respons terhadap kredit bermasalah menjadi kurang cepat disebabkan : sistem monitoring belum terintegrasi, data debitur belum real-time, belum tersedia dashboard pengawasan, notifikasi tunggakan terlambat, sistem penilaian risiko belum optimal.
4. Dokumen : Dokumen menunjukkan kualitas administrasi debitur, dokumen yang kurang lengkap menyebabkan proses evaluasi penggunaan dana menjadi tidak akurat.
5. Keuangan : Ketika dana tidak digunakan secara produktif, kemampuan membayar angsuran akan menurun, hal ini disebabkan beberapa faktor: dana digunakan di luar tujuan usaha; arus kas usaha tidak stabil, pendapatan debitur menurun, tidak memiliki dana Cadangan, pengeluaran konsumtif tinggi, perencanaan keuangan lemah.
6. Lingkungan : Kondisi lingkungan seperti : kondisi ekonomi menurun, persaingan usaha meningkat, bencana alam, inflasi, akses pasar terbatas, literasi keuangan masyarakat masih rendah dapat menyebabkan usaha debitur mengalami penurunan sehingga pembayaran angsuran ikut terganggu.
7. Manajemen : Kelemahan manajemen menyebabkan proses pengendalian risiko kredit menjadi kurang efektif, hal ini dapat disebabkan oleh: pengawasan internal belum optimal, evaluasi portofolio kredit belum berkala, koordinasi antar-instansi kurang efektif, tindak lanjut tunggakan lambat, indikator kinerja pengawasan belum jelas.

Pada alur permasalahan ini menunjukkan bahwa akibat pengawasan yang lemah menyebabkan penyalahgunaan dana yang merupakan penyebab awal, yang kemudian mempengaruhi kinerja usaha debitur. Penurunan pendapatan menyebabkan keterlambatan pembayaran angsuran, yang pada akhirnya meningkatkan rasio Non-Performing Loan (NPL). Dampak jangka Panjang dari hal tersebut adalah keberlanjutan Program Kredit Tabalong Smart terancam, kemampuan BPR menyalurkan kredit baru menjadi berkurang, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, target peningkatan ekonomi daerah dan pemberdayaan UMKM tidak tercapai secara optimal.

ALTERNATIF SOLUSI

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka menjadi dasar kami untuk merumuskan alternatif kebijakan dan rekomendasi kebijakan. Penilaian dilakukan berdasarkan lima kriteria dengan bobot yang berbeda sehingga menghasilkan urutan prioritas kebijakan yang paling layak diterapkan, kriteria tersebut adalah: efektifitas, kemudahan implementasi, efesiensi biaya, keberlanjutan program dan penerimaan stakeholder. Metode analisis yang digunakan adalah Grid analysis (Analisis Matriks) Dimana setiap alternatif diberi skor 3 (rendah) hingga 5 (tinggi) untuk setiap kriteria. Penjelasan rinci dasar pemberian setiap skor per kriteria disajikan pada Lampiran berikut :



Berdasarkan matriks diatas dapat kita lihat bahwa Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko (4) memperoleh total skor dari semua kriteria dengan skor tertinggi dibandingkan dengan alternatif (1), walaupun alternatif (1) memiliki tingkat efektifitas tinggi akan tetapi pada efesiensi biaya dan kemudahan dalam penerapan masih rendah. Sedangkan alternatif (2) dan (3) walaupun memiliki tingkat alternatif efektifitas cukup tinggi namun tingkat efesiensi biaya masih rendah dan keberlanjutan penerapan kebijakan masih rendah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan matrik diatas Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko (4) memperoleh skor bobot 96 dari 5 kriteria. Alternatif kebijakan tersebut terutama unggul pada aspek efektifitas, efesiensi biaya dan tingkat keberlanjutan penerapan kebijakan dibandingkan alternatif yang lain, sehingga kami merekomendasikan alternatif kebijakan penguatan sistem pengawasan berbasis resiko harus menjadi prioritas utama dalam Program Kredit Tabalong Smart.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardach, E. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving (4th ed.)*. Sage/CQ Press.
- Otoritas Jasa Keuangan (2025). *Standar Pengawasan dan Rasio Kesehatan BPR/BPRS*. Jakarta: OJK.
- PT BPR Tabalong Bersinar (Perseroda) (2026). *Laporan Realisasi Penyaluran Kredit Tabalong SMART s.d. Juni 2026*. Kabupaten Tabalong.
- TV Tabalong / Ariadi, M. (2026). *Liputan Pembiayaan Inklusif Kredit Tabalong SMART Bagi UMKM dan Petani*.